

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Nasionalisme Mahasiswa

Keikutsertaan mahasiswa dalam pergerakan perjuangan bangsa tidak lepas dari rasa nasionalisme. Nasionalisme, menurut Ernest Gellener³¹ adalah suatu prinsip politik yang beranggapan bahwa unit nasional dan politik seharusnya seimbang; nasionalisme adalah suatu bentuk munculnya sentimen dan gerakan. Sentimen secara psikologis merupakan bentuk antipati atau ungkapan marah, benci; yang menurutnya sentimen ini memunculkan bentuk gerakan penekan. Benedict Anderson³² berpendapat bahwa nasionalisme dipahami sebagai kekuatan dan kontinuitas dari sentimen dan identitas nasional dengan mementingkan *nation*, yaitu suatu konstruksi ideologi yang nampak sebagai pembentuk garis antara kelompok budaya dan negara, dan mereka yang membentuk komunitas abstrak berdasarkan perbedaan dari negara, dinasti, atau komunitas berdasarkan kekerabatan yang mendahului pembentukan negara. H. Kohn³³ mengemukakan, nasionalisme adalah suatu bentuk *state of mind and an act of consciousness*, sejarah pergerakan nasional harus ditanggapi sebagai *history of idea*. Jadi ide/pikiran/motif/kesadaran harus berhubungan dengan lingkungan konkret dari sosio-historis.

Menurut Burhan D. Magenda³⁴ bahwa nasionalisme dibangun oleh *founding fathers* bangsa, bahwa nasionalisme sebagai ideologi yang membentuk suatu masyarakat imajiner. Dalam masyarakat imajiner inilah dapat dilihat kebenaran dari teori Clifford Geertz tentang perlunya lembaga-lembaga pemersatu melalui *state building* sehingga ketika *founding fathers* telah tiada negara bangsa tetap bertahan dan tidak pecah berantakan. Dan lembaga pemersatu tersebut ialah, birokrasi dan militer, partai politik, sistem pendidikan, komunikasi dan transportasi.

³¹ Arifin, M. 2006:16-21

³² Anderson, Benedict. 1999:100

³³ Masoed, Mohtar. 1998:195

³⁴ Burhan D. Magenda, 2001

Beberapa rumusan nasionalisme yang dikutip oleh Sartono Kartodirdjo³⁵ antara lain; nasionalisme sebagai persepsi mahasiswa terhadap nasionalisme pasca reformasi (K. Lamprech.1920) mental masyarakat (F, Meineck.1901), sejumlah perasaan dan ide yang kabur (F. Hertz.1951), *a sense of belonging*. Sejumlah pengertian tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar, justru menunjukkan persamaan, yaitu semua lebih bersifat sosio-psikologis. Artinya nasionalisme tidak lahir dengan sendirinya, tetapi lahir dari suatu respon secara psikologis, politik, dan ideologis terhadap peristiwa yang mendahuluinya, yaitu imperialisme. Dengan demikian terbentuknya nasionalisme lebih bersifat subyektif karena merupakan reaksi *group consciousness, we-sentiment, corporate will* atau kesadaran berkelompok dan berbagai fakta mental lainnya.

Ditambahkan oleh Sartono³⁶, bahwa nasionalisme mempunyai tiga aspek yaitu: *Pertama*, aspek kognitif yang menunjukkan adanya pengetahuan akan suatu fenomena yaitu situasi kolonial pada segala posisinya. Aspek ini bersisi persepsi, kepercayaan, dan *stereotype* yang dimiliki individu mengenai sesuatu, sering disamakan dengan opini, terutama jika menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. *Kedua*, aspek afektif yang menunjukkan kesadaran yang dianggap berharga oleh pelakunya; dalam hal ini adalah bebas dari kolonialisme. Sikap afektif merupakan perasaan individu terhadap obyek sikap dan perasaan menyangkut masalah emosional yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap yang paling bertahan terhadap pengaruh yang mungkin mengubah sikap seseorang. *Ketiga*, aspek psikomotorik yaitu tindakan kelompok yang menunjukkan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan bagi pelakunya. Aspek ini berisi tendensi atau kecenderungan bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu.

Dari ketiga aspek nasionalisme ini, akan memunculkan sikap kritis yang berkaitan dengan sikap politik dalam bernegara, seperti yang diungkapkan oleh Suwondo³⁷. Yaitu, bagian proses yang membentuk sikap dan perilaku politik melalui pewarisan. Proses pewarisan ini dilakukan melalui berbagai perantara, yaitu keluarga, sekolah/universitas, lembaga politik, pengalaman politik, pekerjaan dan usaha-usaha yang bersifat mendidik dari mereka yang sedang

³⁵ Sartono Kartodirdjo 1972

³⁶ Sartono Kartodirdjo. 1972:55-69

³⁷ Suwondo, 2002: 75-77

berkuasa. Proses politik di kalangan mahasiswa sebagian besar berlangsung melalui pendidikan di kampus, baik oleh dosen maupun dengan diskusi antar kelompok studi yang umumnya membahas teori dan membandingkannya dengan kenyataan yang sedang terjadi; walaupun keluarga juga memberi warna terhadap pembentukan sikap mahasiswa. Dampak pewarisan ini, pengetahuan tentang politik meningkat dan menjadi sadar politik serta berani menunjukkan sikap terhadap kehidupan politik yang sedang berlangsung.

Pendidikan merupakan tempat tumbuhnya nasionalisme, demikian dikatakan oleh Sitor Situmorang³⁸ bahwa sejak lahirnya paham kebangsaan Indonesia rasionalisme telah diadopsi sebagai unsur budaya baru melalui pendidikan kolonial Barat, menumbuhkan kesadaran dan sikap baru pada permulaan abad 20. Lahirlah kaum intelektual, elit baru, pelopor dari paham kemerdekaan berdasarkan nasionalisme dengan cita-cita demokrasi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini digarisbawahi oleh Sartono³⁹, bahwa cakrawala kultural generasi muda dilatarbelakangi oleh budaya bangsa (*heritage*) yang perlu dijamin kesinambungannya serta dijadikan landasan bagi pembangunan budaya di masa depan dengan menanamkan nilai-nilai keunggulan sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, ideologi Pancasila, dengan dukungan sejarah nasional dapat memperkokoh kerangka orientasi masa depannya. Sehingga, menurut A.R. Soehoed⁴⁰, para mahasiswa perlu diberi kuliah wajib berupa suatu kombinasi dari *civics*, sejarah ekonomi, dan sejarah politik bangsa dan geografi negara sendiri. Di sekolah dasar dan sekolah menengah landasan pengetahuan umum dan dasar-dasar *civics* perlu diperluas.

Nasionalisme di Indonesia, menurut Kahin⁴¹ dibentuk oleh lingkungan penjajahan abad ke-20, lingkungan tersebut bersumber dari akar-akar yang dapat mencapai jauh ke dalam lapisan sejarah yang jauh lebih tua. Hal ini digarisbawahi oleh Sukarno⁴² bahwa nasionalisme erat hubungannya dengan kebutuhan negara bekas jajahan untuk merdeka yang berdaulat dalam bentuk gagasan persatuan,

³⁸ Sitor Situmorang, 1978:13

³⁹ Sartono, 1997

⁴⁰ Soehoed, 2002:135

⁴¹ Kahin, 1995:1

⁴² John D. Legge, 1972:99

suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh ras, bahasa, agama, perbatasan wilayah tetapi yang lebih penting adalah jiwa bangsa yang mempunyai kesamaan sejarah dan keinginan menjadi satu. Maka yang menjadi ciri nasionalisme adalah cita-cita persatuan nasional, toleransi dan harmoni dalam bentuk kesepakatan dan musyawarah, sikap non-kooperatif terhadap penjajah, dan sikap marhaenisme yang merupakan perjuangan dari hati nurani rakyat yang sederhana. Menurutnya, nasionalisme juga bermakna penghormatan terhadap bangsa lain.

Ditambahkan oleh Kurniawan⁴³ bahwa nasionalisme kita bukan *right or wrong is my country*, atau sentimen berlebihan atas bangsa, karena dapat berbuah rasialisme dan memperkosa kemanusiaan dan kebenaran. Nasionalisme tidak sekedar mengabdikan kepada sebarang negara politik semata-mata, tetapi juga lebih pada bangsanya, nasib warga di dalamnya. Dengan demikian kemanusiaan adalah panutannya dan ketuhanan adalah dasarnya. Nasionalisme tidak mati, dia hidup di hati rakyat, termasuk pemudanya. Mungkinkah Sumpah Mahasiswa di era 1980-an ini dapat diterima, yaitu: *bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan; berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan; dan berbahasa satu, bahasa kebenaran.*

Nasionalisme Indonesia berorientasi spiritualitas Timur yang melahirkan Pancasila yang oleh Sukarno dikemukakan kali pertama pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945. Pada pidatonya, Sukarno⁴⁴ mengklaim bahwa Pancasila bukan hasil reaksi dirinya, melainkan sebuah konsep yang berakar pada budaya masyarakat Indonesia yang terkubur 350 tahun masa penjajahan. Klaim ini mengandung arti; *pertama*, masa penjajahan 350 tahun adalah sebuah mitos sebagai strategi membakar sentimen anti Belanda; *kedua*, Pancasila merupakan konsep yang benar-benar produk *indigenous* (asli) yang merupakan kombinasi dari humanisme, sosialisme, nasionalisme, Islamisme (gerakan Islam modern di Timur Tengah). Dalam konteks politik saat itu, Pancasila ditawarkan sebagai upaya rekonsiliasi antara kaum nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam.

⁴³ Kurniawan, 1996

⁴⁴ Sulfikar Amir, 2004:4

Sukarno⁴⁵ menambahkan bahwa bangsa ini harus mempunyai satu nyawa, satu azas akal yang terjadi dari dua hal, *pertama*; rakyat harus bersama-sama menjadi satu riwayat, *kedua*; rakyat harus mempunyai kemauan, keinginan hidup bersatu; bukannya jenis (RAS), bukan bahasa, bukan pula batas-batas negeri yang menjadi satu bangsa itu. Nasionalisme adalah suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat adalah satu golongan satu bangsa. Sedangkan yang dimaksud dengan bangsa adalah suatu persamaan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ikhwal yang dijalani oleh rakyat, kemudian disebutkan bahwa rasa nasionalisme ini akan menimbulkan rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa untuk mempertahankan negeri dari serangan/gangguan dari bangsa lain. Hal ini juga digaribawahi oleh Deliar Noor⁴⁶ bahwa nasionalisme suatu bangsa tidak terbangun dari kesamaan bahasa, RAS maupun agama, tetapi dibentuk oleh kesamaan pengalaman yang memunculkan kebersamaan yang ingin dilanjutkan lebih jauh di masa depan yang didasari pengalaman pahit yang dilalui bersama.

Menurut Sartono⁴⁷, nasionalisme tidak lepas dari keberadaan kolonialisme atau penjajahan kolonialisme di Indonesia telah dirasakan sejak tahun 1511, yaitu ketika Portugis menundukkan Malaka, dan sekitar tahun 1640 ketika Belanda berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Portugis masuk ke wilayah Nusantara melalui perdagangan, demikian juga dengan Belanda menguasai perdagangan *interinsuler* di hampir seluruh Nusantara. Hal ini menunjukkan awal masuknya penguasaan kolonialisme Belanda, terutama di Pulau Jawa ketika Raja Mataram menyerahkan kekuasaan atas daerahnya di Pantai Utara Pulau Jawa kepada VOC tahun 1749.

Eksplorasi kolonial Belanda mulai dirasakan di Pulau Jawa sejak tahun-tahun pembubaran Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), tahun 1675 dan awal pembentukan *culturstelsel*, terutama rencana Daendels membangun sarana dan prasarana yang membutuhkan pengerahan tenaga kerja paksa dan rencana Raffles menerapkan sistem pajak tanah. Puncaknya ketika Jenderal Van den Bosch (1830) mengeluarkan kebijakan tentang eksploitasi negara tanah jajahan menjadi pedoman kerja pemerintah kolonial. Maksud kebijakan tersebut untuk mencapai peningkatan semaksimal mungkin produksi pertanian untuk Eropa.

⁴⁵ Bung Karno. 1965: 3

⁴⁶ Deliar Noor. 2003: 280

⁴⁷ Sartono Kartodirdjo. 1972:29-29

Kebijakan ini lebih bermuatan ekonomi, tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat berdampak pada kebijakan yang bersifat politis; yaitu adanya perluasan jabatan pemerintah kolonial secara besar-besaran di Nusantara; mulai dari keresidenan hingga ke distrik. Sistem pemerintahan ini bersifat sentralistik dan ekstrem, birokrasi kaku dan otokrasi mutlak, tidak ada satu badan politik pun yang menjadi alat penyalur aspirasi rakyat. Jelas bahwa penindasan ini memunculkan kesadaran untuk melepaskan diri dari kungkungan kolonialisme, bentuk kesadaran inilah mengarah pada suatu bentuk ikatan sentimen dan solidaritas sosial berupa nasionalisme.

Nasionalisme di Indonesia dimunculkan berbagai bentuk pergerakan nasional. Pergerakan ini lebih disebabkan oleh adanya kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi yang tertindas, terbelakang, dan diskriminatif yang melahirkan suatu keinginan untuk bebas, merdeka, dan maju. Sedangkan secara eksternal, dipengaruhi oleh perlakuan Jepang terhadap Rusia tahun 1905, kemudian Gerakan Turki Merdeka, Revolusi Cina, dan gerakan nasional di negara-negara tetangga, seperti India dan Filipina. Peristiwa-peristiwa tersebut membesarkan kesadaran nasional yang memunculkan harga diri sebagai bangsa yang mandiri. Walaupun pengaruh eksternal ini dapat membangun kesadaran pemuda Indonesia “kalau mereka bisa kenapa kita tidak bisa”; tetapi sebenarnya kesadaran akan harga diri bangsa lebih dimunculkan karena faktor internal karena dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia.

Sartono⁴⁸ menyatakan bahwa, pergerakan nasional terjadi saat sekelompok mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia berhasil merumuskan program perjuangan, yang kemudian dikenal dengan nama Manifesto Politik. Deklarasi dan tujuan gerakannya dimuat dalam majalahnya yaitu *Indonesia Merdeka*, terbitan April 1925. Manifesto Politik tersebut berisi empat diagnotis penyakit sosial pada waktu itu dan pernyataan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh rakyat Indonesia sendiri. Manifesto juga menghendaki adanya persatuan adalah *conditio sine qua non* untuk keberhasilan perjuangan meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu, ideologi nasionalisme yang menjadi etos bagi generasi protagonis perjuangan Indonesia Merdeka, generasi muda (tidak terkecuali mahasiswa) masa kini mengemban

⁴⁸ Sartono, 1997: 803 dan Sartono, 2005: 11-18

utusan untuk menyempurnakan perealisasi nasionalisme Indonesia yang berprinsip kesatuan, kebebasan, kesamaan, keunggulan hasil karya dan kepribadian.

Meskipun muncul berbagai gerakan, yang bersifat kesukuan; tetapi pada akhirnya dapat dipersatukan oleh gerakan-gerakan yang bersifat integratif karena dapat merangkul semua kepentingan. Gerakan Pribumi, Perhimpunan Indonesia, dan puncaknya Sumpah Pemuda; dikatakan sebagai gerakan yang integratif yang mengusung Ideologi Nasionalis, antara lain: *Pertama*, Kesatuan nasional; perlunya mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang sempit dan perlu dibentuk suatu kesatuan aksi melawan Belanda untuk menciptakan kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu. *Kedua*, Solidaritas tanpa melihat perbedaan yang terdapat antara sesama bangsa Indonesia, dan perlu kesadaran adanya pertentangan kepentingan antara penjajah dan yang terjajah, serta kaum nasionalis harus mempertajam konflik. *Ketiga*, Non-kooperatif; keharusan untuk menyadari bahwa kemerdekaan bukan hadiah suka rela dari Belanda, tetapi harus direbut oleh bangsa Indonesia dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dan oleh karena itu tidak perlu mengindahkan Dewan Perwakilan Kolonial. *Keempat*, Swadaya; dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri perlu dikembangkan suatu struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang kuat berakar dalam masyarakat dan sejajar dengan administrasi kolonial.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, melahirkan nasionalisme Indonesia, yang terangkum dalam pembukaan UUD 1945. Yaitu mencapai cita-cita nasional; membentuk negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; dan mewujudkan tujuan nasional; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang didasari oleh perdamaian abadi yang berlandaskan Pancasila.

Bangsa Indonesia harus mampu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia, terutama kekuasaan pemerintah. Terjadi periodisasi pembangunan, yaitu *pertama*; 1945 sampai 1965 Orde Lama, *kedua*; 1965 sampai 1998 Orde

Baru, *ketiga*; 1998 sampai sekarang Orde Reformasi. Semua orde membutuhkan nasionalisme dari warga negara, yang bentuknya mengikuti perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Masyarakat adalah kumpulan orang yang diikat oleh suatu pola atau karakteristik tertentu; misalnya wilayah, profesi, kegemaran, tujuan; contohnya pada pasca-reformasi, muncul istilah *masyarakat madani (civil society)*⁴⁹, yaitu masyarakat yang mempunyai tujuan bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban bukan agama, politik, paham, dan bukan dikotomis sipil militer. Masyarakat madani menginginkan tatanan hidup yang manusiawi, tanpa kekerasan, berdasarkan hukum, aktif mengimbangi negara, proses *check and balance* antar kaum terpelajar; sesuai dengan azas demokrasi, HAM dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Bangsa adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan berpemerintahan sendiri. Bangsa biasanya terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Bangsa Indonesia ialah sekelompok orang/manusia yang mempunyai beberapa kesamaan dan kepentingan yang sama pula serta menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia. Pernyataan diri bangsa-bangsa di Nusantara sebagai bangsa Indonesia dilakukan oleh pemuda-pemuda pada Sumpah Pemuda, yaitu *Kami putra dan putri Indonesia menyatakan berbangsa satu bangsa Indonesia*.

Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok orang tersebut. Satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada di suatu wilayah yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.

Dari beberapa teori nasionalisme mahasiswa di atas, maka dirumuskan definisi konseptual nasionalisme mahasiswa sebagai variabel terikat (X1) dalam

⁴⁹ Istilah masyarakat madani masih menjadi kontroversial, contohnya Abdurahman Wahid menggunakan istilah "*civil society*"; Mansour Fakih dengan "masyarakat sipil"; Azyumardi Azra menggunakan "masyarakat madani"; Ryaas Rasyid dengan "masyarakat kewargaan"; sedang universitas Atmajaya menggunakan istilah "masyarakat warga" (Manufrizal 2005:14)

penelitian ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara yang mempunyai potensi untuk diperjuangkan dalam pergerakan mahasiswa.

2.2 Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial (*social change*) menurut Agus Comte (1798-1857)⁵⁰ dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, teori *social static* berupa struktur mapan dan dalam waktu tertentu; yang membahas struktur sosial yang melandasi orde, tertib, dan kestabilan masyarakat; statika sosial yang kemudian disepakati sebagai kemauan bersama. Kodrat manusia adalah persatuan, perdamaian, kestabilan, dan keseimbangan, tanpa ini, masyarakat akan pecah. *Kedua*, teori *social dynamic* merupakan hal yang berubah dari waktu ke waktu; yang mempelajari perubahan yang mendorong pada keseimbangan baru yang lebih tinggi dari satu generasi ke masa berikutnya dengan upaya mengganti gagasan-gagasan lama dengan konsep-konsep positif dan ilmiah. *Social static* dan *social dynamic* saling berkait yang membedakannya adalah kajiannya.

Max Weber (1864-1920)⁵¹ menjelaskan bahwa struktur sosial atau stratifikasi sosial dibentuk berdasarkan kepentingan kelas, yaitu “kelas” (kuat secara ekonomi), “status” (kuat secara sosial), dan “pemerintah” (kuat secara politik); ketiga kelas ini saling mempengaruhi. Kekuatan masing-masing kelas dipengaruhi oleh kepemilikan sumber daya sosial berupa lahan, modal, rasa hormat sosial, kekuatan fisik, dan pengetahuan sehingga posisi kelas sering disamakan dengan posisi pasar kerja. Dalam hal ini pembagian kelas ditentukan berdasarkan; kepemilikan harta benda, kepemilikan jabatan; keduanya memunculkan empat kelas sosial yaitu *pertama*, borjuis (memiliki harta benda), *kedua*; para profesional kerah putih, *ketiga*; bourgeoisie fisik (kelas menengah atas), dan *keempat*; pekerja.

Teori Weber ini lebih menekankan pada menguasai akses sumber daya material (ekonomi), dan kepemilikan materi mempunyai akses yang lebih dekat pada politik. Perjuangan kelas menambah jumlah kelas akibat dengan bertambahnya kebutuhan jabatan dalam industri, seperti direktur, pengacara, akuntan, sekretaris. Kelas menengah ini kemudian dibagi lagi menjadi kelas

⁵⁰ Dalam Agus Salim, 2002: 9-11

⁵¹ A level sociology. <http://www.sociology.org.uk/siweber.pdf?fb193d88>

menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah. Kelompok ini adalah pegawai intelektual, pengawas, dan pekerja produktif. Dasar pengelompokan kelas adalah kesadaran kelas yang diawali oleh kesadaran individu untuk kepentingan bersama. Kelas sosial tidak pernah berbentuk asosiasi, kecuali jika ada kepentingan kuat untuk memperjuangkan nasib bersama atau *social action*. Kelas sosial bahkan dapat membentuk front guna memperjuangkan nasib bersama untuk kekuasaan ekonomi, meskipun dapat juga dilatarbelakangi oleh politik. Ekonomi menjadi dasar perilaku masyarakat, perjuangan kelas dalam ekonomi ini diawali ketika terjadi proses industrialisasi di Inggris, ketika mesin-mesin industri menggantikan tenaga manusia sehingga manusia mengenal sistem penyelenggaraan manajemen bisnis. Industrialisasi berdampak pada perubahan sosial ketika memasuki sendiri kehidupan masyarakat agraris (lihat Budisantoso, 1996).

Mahasiswa sebagai kelompok kelas menengah ke bawah kelas keempat berusaha mempertahankan dan atau meningkatkan kelas ke kelompok yang lebih tinggi melalui pendidikannya, baik secara akademis maupun nonakademis dalam bentuk pergerakan. Menurut Burhan D. Magenda⁵²; dalam memperjuangkan nasib terjadi perjuangan kelas yang bertujuan meningkatkan kelas, sehingga terjadi perubahan sosial. Salah satu perjuangan kelas adalah melalui pendidikan, di Indonesia dimulai pada politik etis Belanda. Puncaknya, pada tahun 1960 terjadi ekspansi yang sangat besar dalam PT karena jumlah lulusan SLTP dan SLTA bertambah, yang semuanya berharap menjadi mahasiswa. Untuk menampung eksploitasi ini, terjadilah perluasan PT baik secara horizontal maupun vertikal. Mahasiswa dengan jumlah yang besar ini, mengundang mereka untuk membentuk organisasi-organisasi untuk menyuarakan kepentingannya sendiri maupun mewakili aspirasi masyarakat. Melalui PT ini, terbentuklah kelas menengah yang menjadi ciri pergerakan mahasiswa yang anti *establishment* yang mempunyai kecenderungan radikal (lihat Ahmad Suhelmi, 2007). Lulusan PT akan bekerja di industri dengan upah yang cukup baik sehingga mampu membawa keluarganya dari kelas menengah ke bawah menjadi kelas menengah ke atas, dan memunculkan elit baru ekonomi (lihat Weber).

⁵² Burhan D. Magenda, 1977:8

Roy Bhaskar (1984)⁵³ menjelaskan bahwa proses perubahan sosial yang dibagi menjadi dua: *Pertama*, proses reproduksi yaitu proses yang berulang-ulang yang menghasilkan kembali warisan budaya nenek moyang yang berupa material (kebendaan dan teknologi) dan immaterial (non-benda, adat, norma, dan nilai-nilai). *Kedua*, proses transformasi ialah proses penciptaan hal baru yang dihasilkan oleh ilmu dan teknologi yang mengubah sistem material. Perubahan sosial mempunyai ciri berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu, direncanakan atau tidak, dalam proses wajar/alamiah atau dipaksakan, cepat atau lambat, lembut atau keras tergantung situasi yang mempengaruhinya. Hasil proses transformasi sosial ialah terbentuknya kelas menengah sebagai hasil perubahan sosial, khususnya pada keberadaan mahasiswa yang mendapat tempat di masyarakat sebagai kaum intelektual yang mampu mengusung ide-ide baru dan dianggap mempunyai prestise yang tinggi (lihat Denny J.A. 1998).

Perubahan sosial, menurut teori Karl Marx (1818-1883)⁵⁴ yaitu bahwa dalam sejarah masyarakat hingga sekarang perubahan sosial merupakan perjuangan kelas karena masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas antagonis; perjuangan muncul antara kelas si tertindas melawan kelas si penindas. Mereka terus-menerus melakukan perjuangan dalam berbagai bentuk yang dapat berakhir dengan penyusunan kembali masyarakat umum atau kelas-kelas yang saling bermusuhan tersebut sama-sama binasa. Karl Marx⁵⁵ menambahkan bahwa dinamika perubahan sosial, dijelaskan bahwa ada tiga aspek perubahan sosial dapat diterangkan dari sejumlah hubungan sosial yang berasal dari pemilihan modal atau material.

Ketiga aspek tersebut ialah: *Pertama*, perubahan sosial menekankan pada kondisi materialistis berpusat pada perubahan-perubahan cara atau teknik-teknik produksi material sebagai sumber perubahan sosial budaya; yang mencakup perkembangan teknologi baru, penemuan sumber-sumber baru dalam kegiatan produksi. Kontradiksi dapat terjadi oleh hubungan antara buruh dan majikan karena teknologi dapat mendatangkan bencana karena digunakan untuk mengeksploitasi buruh. *Kedua*, perubahan sosial utama adalah kondisi-kondisi material dan cara-cara produksi di satu pihak dan hubungan sosial dan norma

⁵³ Dalam Agus, 2002: 21

⁵⁴ Suharsih, 2007: 31

⁵⁵ Dalam Johnson, 1986: 132-133

pemilikan, di pihak lain; mulai dari komunitas primitif sampai bentuk kapitalis modern. Pada tahap kehidupan komunal masyarakat di bawah ideologi individual dan kekurangan hubungan manusiawi, menjadi hubungan pemilikan. Dalam kapitalis, hubungan sosial semata-mata oleh kerangka menjual tenaga kepada majikan. *Ketiga*, dapat dinyatakan bahwa manusia menciptakan sejarah materialnya sendiri, selama ini mereka berjuang menghadapi lingkungan materialnya dan teribat dalam hubungan sosial yang terbatas dalam proses pembentukannya. Kemampuan ini dibatasi oleh keadaan lingkungan material dan sosial yang ada, manusia akan dibatasi oleh kepemilikan alat-alat produksi, hubungan antara konflik kelas yang telah menjadi turunan hubungan sosial yang diciptakannya sendiri.

Menurut Trotsky (1930)⁵⁶ bahwa semangat demonstrasi mahasiswa hanya usaha yang dilakukan oleh generasi borjuis, khususnya kaum borjuis kecil, untuk menemukan solusi bagi ketidakstabilan yang dialami negara setelah kebebasan semu dari kediktatoran Primo de Rivera, yang elemen-elemen dasarnya masih sepenuhnya tersembunyi. Ketika kaum borjuis secara sadar dan keras kepala menolak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari krisis masyarakat borjuis, dan ketika kaum proletar belumlah siap untuk menyandang tugas ini, maka seringkali para mahasiswa yang tampil ke depan. Selama masa perkembangan revolusi Rusia yang pertama (1905), misalnya, ada fenomena ini terjadi lebih dari satu kali, dan tanda-tanda kemunculannya dapat diamati. Aktivitas mahasiswa yang revolusioner ataupun yang semi-revolusioner seperti ini mempunyai arti bahwa masyarakat borjuis tengah menghadapi krisis yang amat dalam. Pemuda-pemuda borjuis kecil, merasakan kekuatan eksplosif sedang terbangun di tengah massa, berusaha dengan cara mereka sendiri untuk keluar dari kebuntuan dan untuk mendorong perkembangan politis ke arah yang lebih maju. Dalam hal ini, Trotsky tidak setuju bahwa pergerakan mahasiswa mampu dalam memperjuangkan kelas karena mahasiswa merupakan golongan kaum borjuis yang tidak memerlukan peningkatan kelas. Menurutnya, perjuangan buruh lebih dapat menentukan dan memenangkan perjuangan kelas, karena kaum buruh mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kelas menjadi kelas menengah.

⁵⁶ Dalam Suharsih, 2007:38

Suharsih⁵⁷ menjelaskan bahwa perubahan sosial di beberapa negara, peran pergerakan mahasiswa sangat penting, mereka lebih sering mencerminkan perubahan kekuasaan di antara kelas-kelas. Misalnya, demonstrasi dan pergerakan mahasiswa memainkan peran yang cukup penting dalam menggulingkan Peron di Argentina (1955), Perez Jimnez di Venezuela (1958), Diem di Vietnam (1960), perlawanan terhadap Perjanjian Keamanan Jepang-AS di Jepang (1960), kejatuhan Ayub Khan di Pakistan (1956), Revolusi Hongaria (1956), gerakan untuk pembebasan di Cekoslovakia (1968), bahkan Revolusi Rusia; yang diawali oleh gerakan kaum intelektual (1860-1870), dan Revolusi Spanyol (1930).

Sedangkan Agus Salim⁵⁸ menyatakan bahwa perubahan sosial adalah proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang terjadi secara alamiah maupun rekayasa sosial dan berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia baik pada tingkat komunitas lokal, regional, maupun global. Perubahan sosial merupakan bentuk peradaban manusia yang terjadi akibat adanya eskalasi perubahan alam, biologis, fisik; bukan saja oleh dampak pembangunan yang dipaksakan oleh pemerintah. Perubahan sosial akan berdampak pada kehidupan manusia sebagai satuan sosial terkecil. Sedangkan manusia hanya dapat berubah melalui pendidikan yang terdiri atas tiga sistem, yaitu *the learning classroom*, *the learning school*, dan *the learning community*; sehingga kehidupan manusia tidak dapat lepas dari aktivitas belajar.

Hal ini digaribawahi oleh Soetjatmoko⁵⁹ yang menyatakan bahwa untuk mengantisipasi masalah kependudukan, tenaga kerja, kemiskinan, ekonomi internasional, dampak ilmu dan teknologi, pemanasan global, dan hal lain yang menimbulkan perubahan sosial, masyarakat Indonesia harus mempunyai kemampuan. Yaitu: *pertama*, harus serba tahu dengan cara tidak pernah berhenti belajar karena kita berada pada era *long-life learning*, *kedua*; harus mampu mencerna informasi yang semakin lama semakin banyak, *ketiga*; mampu menganalisis serta berpikir secara integral dan konseptual sehingga dapat bereaksi dengan cepat, *keempat*; mampu menalar secara rasional dan mampu berpikir kreatif dalam menghadapi hal baru disertai keberanian bertanggung jawab, *kelima*; mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dan batas-batas toleransi

⁵⁷ Suharsih, 2007: 37

⁵⁸ Agus Salim, 2002:1-5

⁵⁹ Soetjatmoko, 1993: 35-37

masyarakat terhadap perubahan sosial dan ketidakadilan, *keenam*; mempunyai harga diri, percaya diri, dan mandiri sehingga mampu bekerja sama dan berorganisasi, *ketujuh*; mampu mengidentifikasi dimensi moral dan etis dalam perubahan sosial dan pilihan teknologi sehingga dapat menginterpretasikan perkembangan baru. Kemampuan-kemampuan tersebut hanya dapat diciptakan melalui usaha pendidikan.

Dijelaskan oleh Budhisantoso⁶⁰, bahwa masyarakat menghadapi tantangan dengan mengacu pada sistem kebudayaan yang mereka kembangkan sebagai abstraksi pengalaman pendahulunya. Kebudayaan akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, kemajuan teknologi, dan perkembangan hidupnya; demikian juga sebaliknya. Bahkan, kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat dan berfungsi sebagai rujukan untuk menjelaskan suatu pengalaman dan tantangan serta merangsang tindakan sosial. Karenanya, keberhasilan suatu program pembangunan tidak lepas dari pengaruh pemahaman masyarakat terhadap rencana dan sasaran pembangunan, cara-cara mewujudkannya, dan kapan hendak dilaksanakannya. Perubahan sosial tidak terlepas dari pengaruh teknologi untuk mempermudah manusia dalam mengeksploitasi alam, betapapun kecilnya, selalu merangsang perkembangan sosial budaya secara berantai. Nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial sangat besar pengaruhnya terhadap kesiapan suatu masyarakat mengambil alih teknologi. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa industrialisasi membawa revolusi kebudayaan.

Ditambahkan oleh Budhisantosa, 1996⁶¹; masyarakat Indonesia sekarang ini sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Antara lain, ciri masyarakat agraris antara lain makna dan tujuan hidup diselaraskan dengan sistem pemanfaatan sumber daya alam, nilai-nilai budaya sangat menghargai keseimbangan lingkungan, kepercayaan, dan menggunakan teknologi dengan energi secara tidak berlebihan. Sedangkan masyarakat industri bercirikan; mempunyai jaringan sosial yang lebih kompleks, tidak lagi terikat dalam lingkungan setempat, penggunaan teknologi maju yang cenderung eksploratif, kebutuhan hidupnya yang terus meningkat.

⁶⁰ Budhisantoso, 1997: 111

⁶¹ Budhisantosa, 1996

Menurut Koentjaraningkat⁶² yang perlu dimiliki oleh manusia Indonesia adalah nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, yang memaksa hidup berhati-hati dan berhemat. Nilai yang berhasrat mengeksplorasi alam juga diperlukan untuk menumbuhkan inovasi teknologi, walaupun memerlukan adaptasi yang kadang-kadang sesulit proses mengembangkan teknologi itu sendiri. Kenyataannya, akibat kemunduran ekonomi, sosial, dan budaya pasca revolusi, manusia Indonesia cenderung mempunyai mentalitas yang meremehkan mutu, mentalitas suka menerabas atau jalan pintas, mentalitas tidak berdisiplin, dan mentalitas suka mengabaikan tanggung jawab.

Sedangkan menurut Kuntowijoyo⁶³, perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan pandangan ekonomi, perubahan pandangan kenegaraan, perubahan pandangan politik, perubahan pandangan tentang ilmu dan teknologi, perubahan pandangan, perubahan konsep-konsep teologi, perubahan konsep pemanfaatan lingkungan, dan peranan agama dalam meredefinisi kemanusiaan kita. Atas dasar itu, perubahan sosial atas krisis lingkungan akan dapat diatasi jika manusia mengalihkan pandangan berpikir dari rasionalitas menuju transendensi.

Ditambahkan oleh Fuad Hassan⁶⁴ bahwa tidak kalah penting perkembangan ilmu dan teknologi modern, membuat manusia menghadapi menyempitnya kenyataan ruang, waktu, dan tempo hidup yang radikal yang berbeda dengan apa yang dihayati pada kehidupan tradisional. Manusia urban jadi kehilangan kesempatan untuk menikmati alam sekitarnya dan lebih terbawa oleh arus kehidupan yang mekanistik dan tidak memberikan peluang untuk kontemplasi. Akibatnya, masyarakat cenderung reaktif terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini digarisbawahi oleh Agus Salim⁶⁵ bahwa pemerintah Indonesia selalu dikaitkan dengan masalah perubahan sosial di setiap daerah dengan kerangka konsep pembangunan nasional. Proses pembangunan tidak pernah dilihat sebagai upaya masyarakat lokal untuk menentukan masalah dan menentukan kebutuhannya sendiri. Dengan demikian masalah empirik dalam perubahan sosial akan selalu seragam dialami oleh warga masyarakat sebagai

⁶² Koentjaraningkat, 1983: 34-45

⁶³ Kuntowijoyo, 1993: 47-49

⁶⁴ Fuad Hassan, 1977: 25

⁶⁵ Agus Salim, 2002: 81-82

dampak pelaksanaan program pembangunan yang bersifat menetes dari atas (*trickle down effects*).

Ditambahkan oleh Agus Salim⁶⁶, secara empiris perubahan sosial di Indonesia diidentifikasi dalam lima faktor eksternal, yaitu: *Pertama*, komunikasi; komunikasi dan perkembangan pers sangat pesat, justru ketika pemerintah bertindak represif terhadap media komunikasi, pers yang awalnya sebagai bentuk perjuangan beralih pada bentuk industri yang sangat profit. *Kedua*, birokrasi; di awal tahun 1970-an terjadi perubahan perilaku pedesaan menuju perilaku modern, akibat pengendalian sistem birokrasi perencanaan pembangunan yang sentralistik sehingga banyak prestasi material bukan immaterial. *Ketiga*, modal; upaya mengejar pertumbuhan ekonomi memaksa berhutang ke luar negeri sehingga terjadi ketergantungan modal, akibatnya, muncul mentalitas penadah proyek yang menyuburkan tindakan korupsi. *Keempat*, teknologi; penemuan teknologi modern diterima secara mendua, ada yang menerima, di pihak lain menolak sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. *Kelima*, ideologi-agama, yaitu Pancasila yang dapat berbenturan dengan agama dalam masyarakat, terutama agama Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia.

Dari beberapa teori perubahan sosial di atas, maka dirumuskan definisi konseptual perubahan sosial sebagai variabel terikat (X2) dalam penelitian ini adalah adaptasi masyarakat terhadap pembangunan nasional yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan yang mempunyai potensi untuk diperjuangkan dalam pergerakan mahasiswa.

2.3 Pergerakan Mahasiswa

Menurut Sarlito⁶⁷, istilah mahasiswa diberikan pada peserta didik yang menduduki tingkat pendidikan orang dewasa dan harus bertanggung jawab atas pilihannya. Mahasiswa masih yang berada dalam taraf perkembangan remaja akhir atau memasuki taraf dewasa muda yang telah bisa bertanggung jawab tetapi belum dapat dilepas sepenuhnya. Mereka yang mulai meniti karir ke depan tetapi belum sepenuhnya memiliki kejelasan tentang sikap yang hendak ditampilkan. Selain sebagai anak muda yang sedang belajar untuk mendapatkan gelar atau

⁶⁶ Agus Salim, 2002: 81-83

⁶⁷ Sarlito, 1978: 35

keahlian, mahasiswa diidentikkan dengan kegiatan intra-universitas yang kadang-kadang tidak berhubungan dengan kepentingan belajar. Mahasiswa adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya dari PT. PT adalah lembaga pendidikan formal di atas sekolah lanjutan yang memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, terutama, didasarkan pada teori dan bersifat konseptual yang dapat membangun pemikiran logis-analitis.

Bertambahnya jumlah mahasiswa sejak tahun 1960, bahkan di tahun 1962 telah menjadi satu persen dari jumlah penduduk usia 18-24 tahun, juga menjadi latar belakang pergerakan mahasiswa, menurut Burhan D Magenda⁶⁸ eksploitasi PT ini berpengaruh pada istilah “mahasiswa” yang identik dengan pekerjaan yang baik dan sukses sosial, dan istilah mahasiswa menjadi lebih bersifat egaliterian yang tidak lagi dikaitkan dengan eksklusivisme fisik maupun sosial budaya. Telah dijelaskan bahwa bertambahnya populasi mahasiswa ini menciptakan kelas menengah baru yang mempengaruhi radikalisme pergerakan mahasiswa dalam mencapai tujuan, yaitu perjuangan kelas. Dalam hal ini peran sebagai mahasiswa menjadi daya tarik yang luar biasa karena mahasiswa menjadi kelompok lapisan atas dari susunan kekuatan politik, ekonomi, dan mempunyai prestise serta masuk dalam elit (lihat Suwondo, 2002)

PT mempunyai fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jelas terlihat bahwa PT selalu menyatu dengan masyarakat untuk tempat mengabdikan ilmunya. Itulah sebabnya, PT tidak menjadi “menara gading” di tengah masyarakat. Sebagai konsekuensinya, PT bukan hanya menghasilkan orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi, tetapi juga menghasilkan orang-orang intelektual. Tidak semua sarjana juga adalah seorang intelektual, intelektual mempunyai ciri, antara lain: berpendidikan tinggi setingkat yang diberikan di PT, mempunyai minat pada masalah nasib manusia (moral), mampu menyatakan pendirian moral dan politik secara lisan dan tertulis, lebih mampu dalam mengungkapkan konsep, karena hidup di dunia idea, mempunyai sifat kritis, akibat adanya distorsi antara dunia idea dan dunia nyata.

Mahasiswa adalah insan akademis, calon sarjana, yang dididik menjadi calon intelektual, bahkan ada mahasiswa yang telah menjadi intelektual sebelum

⁶⁸ Burhan D Magenda, 1977:7

menjadi sarjana. Intelektual⁶⁹ diartikan sebagai aktif dalam masyarakat mengusung ide-ide pembaruan. Kehadirannya dalam masyarakat senantiasa bermanfaat. Sedangkan ciri-cirinya ialah: *Pertama*, memahami zaman atau waktunya, seorang intelektual tahu apa yang sedang terjadi dan mampu menyimpulkan *main current* dari perkembangan. *Kedua*, menghayati nilai-nilai universal kemanusiaan (keadilan, persamaan hak, hak untuk hidup, hak untuk menganut sesuatu kepercayaan dan sebagainya, termasuk kesamaan gender). *Ketiga*, mampu berpikir jernih secara lintas sektoral dan tidak terkurung oleh bidang keahliannya sendiri.

Jadi pola tingkah laku kritis pada hakikatnya secara potensial telah terkandung dalam diri mahasiswa, terlepas dari ada atau tidaknya pengaruh yang datang dari luar. Tetapi, mahasiswa juga mempunyai sifat kemudaan, karena rata-rata usianya antara 17-25 tahun. Kemudaan ini merupakan tema sentral dari kesadaran, perkembangan dan tingkah laku yang *tension between self and society*⁷⁰. Ketegangan adanya hasrat memperoleh kebebasan mutlak di antara ikatan sosial; pemuda cenderung menentang tata sosial; akibatnya pemuda menjadi bagian dari masyarakat atau hanya berorientasi pada diri sendiri.

Lain dengan pandangan Ahmad Suhelmi⁷¹; bahwa mahasiswa secara mendasar mempunyai karakter anti *establishment* atau anti kemapanan yang dapat memunculkan anarkisme. Dan akibat kegagalan memahami realita sosial empiris, kaum anarkis cenderung frustrasi dan pada akhirnya menjadi kaum mengkhayal yang berorientasi pada *wishful thinking* dan tidak rasional. Anarkisme menghalalkan ideologi pertumpahan darah untuk melawan situasi dunia yang merindukan perdamaian, keamanan, dan demokrasi, dalam hal demikian, tentunya anarkisme dianggap sebagai musuh. Dalam beberapa hal, mahasiswa menganut aliran anarkisme karenanya, mereka cenderung radikal dan revolusioner tetapi memimpikan masyarakat egaliter. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan Mochtar Lubis⁷² yaitu: “Beranilah memikirkan dan mengucapkan pemikiran yang tidak mungkin”.

⁶⁹ <http://www.lingkarstudy.com/utama/index.php?topic=259.0>

⁷⁰ Keniston dalam Sarlito, 1978: 42

⁷¹ Ahmad Suhelmi, 2007: 32-33

⁷² Mochtar Lubis, 1993

Dari sifat ganda ini (muda dan kritis), mahasiswa tidak segan-segan melakukan perbuatan yang mengandung risiko yang mungkin tidak dilakukan oleh pihak lain, ditambah lagi, biasanya masyarakat toleran terhadap apa yang dilakukan mahasiswa. Karena mahasiswa mempunyai kepekaan atau sikap kritis terhadap kekurangan dan kepincangan dalam realita yang terdapat pada masyarakat, bangsa, dan negaranya; yang memunculkan kecenderungan protes. Karakter mahasiswa yang dapat meningkatkan perannya dalam masyarakat ialah⁷³: *Pertama*, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan tinggi, mahasiswa mempunyai wawasan yang luas hingga mampu bergerak di antara pelapisan masyarakat. *Kedua*, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku pendidikan, mahasiswa mengalami proses sosialisasi politik paling lama sehingga tingkat pengetahuan dan kesadaran politiknya lebih baik daripada kelompok masyarakat lainnya. *Ketiga*, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik karena mahasiswa berasal dari berbagai daerah, suku, agama, dan bahasa terjalin dalam kehidupan bersama; inilah proses akulturasi budaya yang paling tinggi. *Keempat*, mahasiswa sebagai kelompok lapisan atas dari susunan kekuatan, struktur perekonomian, dan prestise; dengan sendirinya merupakan elite yang mempunyai pandangan yang jauh ke depan serta mempunyai keterampilan berorganisasi yang lebih baik di antara kelompok generasi muda lainnya; tambahan lagi; mahasiswa mampu berpikir secara nasional juga kedaerahan sehingga mahasiswa mampu menghadapi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Sebagai implementasi dari karakternya, mahasiswa cenderung melakukan gerakan dalam bentuk aksi, yang sering dinamakan pergerakan mahasiswa. Menurut Suwondo⁷⁴, Pergerakan mahasiswa merupakan aksi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang diilhami oleh tujuan yang bermula dari doktrin ideologi, sebagai respon emosional dan kesadaran intelektual mahasiswa terhadap berbagai kehidupan yang dianggap telah menyimpang dari aturan main politik. Pergerakan mahasiswa dapat berorientasi pada norma sebagai koreksi terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermasalah, dan dapat berorientasi pada nilai yaitu perjuangan ideologi, misalnya pergantian kekuasaan. Jenis

⁷³ Suwondo, 2002: 101

⁷⁴ Suwondo, 2002: 55-57

gerakan mahasiswa ini lebih radikal dan fanatik dibandingkan dengan gerakan mahasiswa yang berorientasi moral, yang damai untuk terciptanya demokrasi yang tidak menghendaki kekerasan dan sesuai dengan kaidah hukum.

Menurut Burhan D. Magenda⁷⁵ membicarakan pergerakan mahasiswa selalu ada dalam dua kondisi. *Pertama*, kondisi obyektif dalam kerangka yang lebih luas yaitu struktur umur dan sistem politik pada masanya. *Kedua*, kondisi subyektif, yakni menilai variabel-variabel yang ruang lingkungannya langsung berhubungan dengan kepentingan para mahasiswa, misalnya latar belakang sosial, keterbukaan pasar tenaga kerja untuk mahasiswa tatkala telah lulus. Kedua kondisi inilah yang melatarbelakangi pergerakan mahasiswa. Pergerakan mahasiswa mempunyai fungsi pendorong nasionalisme dan perubahan politik, yang menurut Denny J.A.⁷⁶ dilatarbelakangi oleh faktor: *Pertama*, pematangan diri mahasiswa sebagai implementasi dari mencari identitas diri guna terjun ke masyarakat; yang dibentuk oleh proses sosialisasi politik sejak masa anak-anak sampai dewasa. *Kedua*, adanya pandangan mahasiswa sebagai cendekiawan yang memang bertugas menyuarakan kebenaran dan keadilan. *Ketiga*, berkenaan dengan kesempatan kerja yang mungkin sulit diperoleh sehingga mengadakan aksi demi perubahan agar dapat kondusif dengan harapan mereka. *Keempat*, Berkaitan dengan kehidupan sosial yang dianggap jauh dari harapan dan persoalan yang merugikan masyarakat, yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan pejabat dalam melaksanakan kekuasaan, seperti otoriter, korupsi, dan praktek primordialisme.

Dari latar belakang tersebut maka penyebab gerakan mahasiswa di era reformasi ialah: *Pertama*, gerakan mahasiswa lahir dari sebuah sikap yang tidak puas terhadap kondisi masyarakat, terutama krisis ekonomi dan krisis politik, tahun 1998 misalnya disebabkan oleh keraguan kompetisi pemerintah dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Kedua*, gerakan mahasiswa disebabkan oleh sikap pemerintah yang lebih moderat terhadap oposisi, akibat dari tekanan *International Monetary Foundation* (IMF) terhadap formulasi kebijakan ekonomi. *Ketiga*, gerakan mahasiswa muncul akibat pelaku dan mahasiswa itu sendiri yang

⁷⁵ Burhan D. Magenda, 1977:3

⁷⁶ Denny J.A, 1998: 42-45

menyediakan lapangan yang berpotensi menimbulkan gerakan, yang dimanfaatkan oleh pemimpin/aktivis mahasiswa.

Salah satu perannya ialah sebagai kekuatan moral dalam politik yaitu sebagai *pressure group* atau pihak penekan yang muncul dari sifat yang dikemukakan oleh Fremerey (1976)⁷⁷ :

“... *its extensive occupational, familial and financial independence, its disposal over a relatively close informal communication network, as well as the limited controllability of its activities by executive bodies*” ...*A mayor danger in writing about student political activity in developing nation is that its ubiquity, intensity, and striking triumphs may blind us to its absences, fragility, and no less striking failures.*”

Yaitu bahwa kebebasan mahasiswa di bidang pekerjaan, kekeluargaan, keuangan yang cukup terbuka, penyelesaiannya dalam berkomunikasi secara informal yang relatif erat, dan mahasiswa mempunyai kemampuan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dibatasi oleh badan-badan eksekutif. Dan hambatan utama dalam menulis tentang kegiatan politik mahasiswa di negara berkembang adalah bahwa keberadaannya, intensitasnya dan keberhasilannya yang menonjol dapat mengecoh kita bahwa mahasiswa mempunyai keterbatasan, kerapuhan, dan beberapa kegagalan yang kurang menonjol.

Hal ini digarisbawahi oleh Lipses (1969)⁷⁸:

“... *Students as a stratum are more opportunities to political trends to change in mood, to opportunities for action, than almost any other group in the population...*”

Mahasiswa sebagai suatu stratum lebih tanggap terhadap kecenderungan politik, perubahan dalam keleluasaan hati, kesempatan untuk bertindak, daripada kelompok lain dalam populasi.

Perannya sebagai *pressure group* diimplementasikan dalam protes, protes mahasiswa, menurut Sarlito⁷⁹, dilatarbelakangi oleh hipotesis: *Pertama, critical hypothesis* yaitu kelemahan mahasiswa sendiri karena kurang disiplin, kurang memegang nilai-nilai, dan tujuan hidup. *Kedua, sympathetic hypothesis* yaitu mahasiswa sebagai korban lingkungan yang rusak; protes merupakan usaha memperbaiki kembali lingkungan. *Ketiga, neutral hypothesis* yaitu adanya proses adaptasi psikologis yang disebabkan oleh perubahan yang sangat cepat pada masyarakat. Sedangkan penyebabnya ialah proses mencari kedewasaan, identitas

⁷⁷ Fremerey 1976:3

⁷⁸ Lipses 1969:497

⁷⁹ Sarlito, 1978: 47-50

dan integritas diri, citra sebagai mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam problem sosial, dan adanya interaksi antara kelompok mahasiswa dengan kelompok lainnya. Fuad Hasan⁸⁰ menjelaskan bahwa proses identifikasi ini berkembang dinamik mengikuti realitas yang memunculkan respon sebagai usaha memantapkan identitasnya dalam kebersamaan sebagai tindakan yang dianggap ideal.

Menurut Burhan D Megenda⁸¹ istilah “kekuatan moral” mahasiswa yakni pergerakan mahasiswa yang berpusat di kampus dan tidak memiliki ikatan organisatoris dengan kekuatan sosial politik di luarnya. Hal ini menimbulkan suatu gejala ambivalensi karena menjadikan pergerakan mahasiswa sebagai “pelopor tanpa pengikut”, yang mendengungkan etos egaliterisme dan diorganisasi secara romantik dan bersifat populis. Jika kekuatan moral dipilih seperti terlihat dalam protes-protes yang radikal yang akan memberikan kesempatan untuk menjadi aktor politik. Penyampaian protes ini dilakukan melalui demonstrasi, sehingga hasil pengalaman sosialisasi politik sebagai bentuk non-kooperatif, mulai era penjajahan sampai sekarang.

Idealnya, pergerakan mahasiswa menerapkan tiga peran dan fungsi⁸², yaitu sebagai: *Pertama, director of change*, mahasiswa berperan dalam merancang, melaksanakan, dan merealisasi setiap perubahan menuju ke arah yang lebih baik; mahasiswa sebagai garda terdepan yang mampu menjadi penyambung lidah rakyat terhadap pembuat kebijakan dan penerjemah kebijakan. *Kedua, agent of change*, mahasiswa memiliki kepekaan, kepedulian, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat tentang kondisi yang teraktual sesuai dengan bidang ilmu masing-masing sehingga mampu melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. *Ketiga, iron stock*, mahasiswa merupakan cadangan masa depan, yang telah diberi pelajaran dan pengalaman sebagai bekal membangun bangsa.

Protes mahasiswa dapat juga dilatarbelakangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi sebagai penggerak masyarakat modern, seperti modal sebagai penggerak masyarakat industri. Kedudukan universitas menjadi sejajar dengan dengan kapital sehingga kedudukan mahasiswa analog dengan kedudukan buruh

⁸⁰ Fuad Hasan, 1974

⁸¹ Burhan D Megenda, 1977: 13

⁸² <http://bem.fmipa.ugm.ac.id/?=27>

yang juga melakukan gerakan. Menurut D.R. Brown⁸³ secara empiris pergerakan atau aktivisme mahasiswa disebabkan oleh penambahan jumlah mahasiswa sejak 1946 dengan populasi yang beragam, tuntutan teknologi menjadikan universitas menjadi penting, kompetisi masuk universitas, media massa yang haus berita kampus, kesadaran mahasiswa atas hak individunya, pertumbuhan sekolah lanjutan yang menghendaki pengajaran universitas, kesenjangan sosial dan ekonomi, etika idealis berganti dengan etika pragmatis, peningkatan *loneliness* oleh peningkatan *anonymity*, peningkatan penggunaan teknologi untuk pekerjaan administrasi, harapan terlalu tinggi terhadap pendidikan tinggi, kematangan fisik lebih awal daripada kematangan sosial-psikologis sehingga ketergantungan makin lama.

Akibat dari adanya potensi protes tersebut, di Amerika⁸⁴, misalnya, mahasiswa menjadi pelopor “revolusi intelek” dan “revolusi teknologi” yang keluar kampus untuk mengadakan perubahan sosial, ekonomi, budaya, politik masyarakat menjadi lebih manusiawi. Kegiatan mereka mengarah pada *civil right* atau persamaan hak kulit putih dan negro. Di Eropa, gerakan mahasiswa selalu idealistis bagi rakyat jelata yang juga dinamakan *new lift*, gerakan yang mengkontra stabilitas yang diusung pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat. Selain kedua macam gerakan tersebut; di Amerika maupun di Eropa, masih banyak mahasiswa yang rajin belajar dan mengadakan penelitian ilmiah untuk kepentingan masyarakat. Di Asia, gerakan mahasiswa agak berbeda, di Thailand, tahun 1973 mahasiswa berhasil menyingkirkan pemerintah militer dan diganti dengan pemerintah sipil.

Sebagai sebuah protes atas kemapanan, pergerakan mahasiswa bisa menimbulkan anarkisme atau kekerasan (lihat Ahmad Suhelmi, 2007) bisa telah dirancang sebelumnya bisa juga terjadi spontan karena perkembangan di lapangan. Kekerasan ini sering tidak dapat dibendung karena pengaruh cara berpikir individu telah diatasi oleh gejala dari kolektivitas. Seperti juga dipertegas oleh Hofstede & Hofstede⁸⁵, perbedaan fundamental dalam hidup bermasyarakat adalah peran sebagai individual dan peran dalam kelompok. Mayoritas orang yang

⁸³ Sarlito, 1978: 55

⁸⁴ Yasmindo, 1975:310-311

⁸⁵ Hofstede, Geert & Gert Jan Hofstede, 2005:

hidup dalam bermasyarakat lebih mementingkan kelompok daripada individu disebut sebagai masyarakat kolektif. Pada kebanyakan masyarakat kolektif, keluarga dengan anak dan saudara yang berkumpul dalam satu rumah akan mengajarkan mereka untuk berpikir bahwa mereka merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan yang secara alami dan saling memiliki ketergantungan.

Menurut F.J. Monks⁸⁶, sebagai remaja akhir yang memasuki desa muda, yang berisis antara 17 sampai 25 tahun, mahasiswa telah diakui sebagai warga negara yang harus telah mempunyai sikap dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Sebagai ciri khas anak muda yang berada di masa pubertas dan kedewasaan yuridis-sosial, mahasiswa akan mewujudkan dirinya sendiri; berusaha membebaskan diri dari pengaruh orang tua. Namun, di Indonesia pelepasan diri dari orang tua ini masih menjaga sikap hormat. Dalam hal ini, mahasiswa telah dapat menginternalisasi penilaian moral menjadi dasar nilai atau prinsip pribadi dan mampu menjalankannya sehingga sikap mahasiswa merupakan hasil yang dicapai yang menempatkan kejadian, kebenaran, dan nilai-nilai dalam suatu sudut pandang tertentu.

Perilaku sebagai wujud sikap kritis mahasiswa dilatarbelakangi oleh motivasi, tujuan, harapan, dan ketersediaan⁸⁷. Keempat unsur ini saling berhubungan saling mempengaruhi secara holistik yang memunculkan perilaku dalam bentuk aktivitas yang diarahkan pada tujuan dan aktivitas tujuan. Menurut Maslow⁸⁸, perilaku dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, dan perwujudan diri. Jika kebutuhan pertama, yaitu fisiologi telah dicukupi, maka penekanan pemenuhan kebutuhan akan diarahkan pada kebutuhan kedua, yaitu memperoleh rasa aman, dan seterusnya sehingga manusia akan sampai pada tingkat bahwa yang paling dibutuhkannya adalah perwujudan diri karena kebutuhan yang lain yang berada di bawahnya sudah terpenuhi dan seolah bukan lagi menjadi sebuah masalah baginya. Sedangkan menurut McClelland,⁸⁹ dalam *theory of learned need* (teori kebutuhanan belajar), motivasi dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan

⁸⁶ F.J. Monks, 1992: 283

⁸⁷ Paul Hersey, 1982:28

⁸⁸ Dalam Streers, Richard M. 1988: 159

⁸⁹ dalam Steven L. Mcshane, 2003:135

pencapaian, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi atau kerja sama.

Menurut Tubagus Ronny⁹⁰, salah satu bentuk aktivitas dalam memenuhi kebutuhan ialah dengan kekerasan. Kekerasan sebagai ekses pergerakan mahasiswa dapat digolongkan dalam kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: *Pertama*, kekerasan kolektif primitif; umumnya bersifat non-politis dengan ruang lingkup terbatas dan bersifat lokal; misalnya dalam bentuk pengeroyokan, pemukulan atau penganiayaan terhadap tukang copet atau dukun teluh; juga tawuran anak sekolah. *Kedua*, kekerasan kolektif reaksioner; merupakan reaksi terhadap penguasa yang pelakunya tidak terbatas dalam suatu komunitas tetapi siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil dan tidak jujur; termasuk dalam jenis ini misalnya ialah pemogokan supir angkot karena tidak menerima kebijakan pemerintah. *Ketiga*, kekerasan kolektif modern merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik; termasuk jenis ini misalnya adalah kekerasan politik di masa kampanye Pemilu.

Peristiwa 14 Mei 1998 merupakan akumulasi dari semua kekerasan kolektif. Kerusuhan kolektif lebih banyak disebabkan oleh ledakan spontan dari kelompok yang kecewa, yang memberikan reaksi terhadap peristiwa dan isu yang muncul. Menurut Harton dan Hunt (1994)⁹¹ kerusuhan mencakup pameran kekuatan, penyerangan terhadap kelompok yang tidak disenangi, perampasan, dan perusakan harta benda terutama milik kelompok yang dibenci. Setiap kekerasan kolektif memberikan dukungan pada kerumunan dan bebas dari tanggung jawab; di dalamnya orang mudah meniru perbuatan orang lain, lepas kendali sehingga dapat bertindak agresif dan destruktif; dan memungkinkan penurunan kadar intelektual dan moral serta hilangnya nasionalisme dari individu yang ada dalam kerumusan. Tubagus Ronny⁹² mengutip beberapa peneliti dan menyatakan bahwa pada umumnya kekerasan kolektif disebabkan oleh terjadinya ketidakpuasan atau konflik antara kelompok-kelompok dalam suatu bangsa/negara dan biasanya berkaitan dengan alokasi sumber daya ekonomi dan

⁹⁰ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001:192-193

⁹¹ Dalam Tubagus Ronny, 2001: 193

⁹² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001: 194

kekuatan politik. Kelompok yang merasa seharusnya dan dapat memperoleh sesuatu yang lebih baik inilah yang mempunyai potensi melakukan kekerasan kolektif, bukan kelompok yang tertindas.

Sikap ditunjukkan dalam respon yang evaluatif berarti bahwa bentuk respon didasari oleh proses evaluasi dalam individu, yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk positif atau negatif. Respon, seringkali tidak sesuai dengan yang diinginkan karena adanya ancaman sehingga bentuk respon sering menyedihkan. Karena adanya kecenderungan manusia mencari aman sebagai pengejawantahan kodrat mempertahankan diri. Salah satu karakteristik respon atau reaksi perilaku manusia adalah sifat diferensialnya, yaitu bahwa satu stimulus yang sama belum tentu menimbulkan bentuk reaksi yang sama dari individu, sebaliknya, suatu reaksi yang sama belum tentu berasal dari stimulus yang sama. Sedangkan menurut Ajzen⁹³ sikap atau attitude adalah evaluasi positif atau negatif individu terhadap hal melakukan tingkah laku atau perilaku

Lain dengan Ronny, Sax (1980)⁹⁴ menyatakan bahwa sikap tidak mudah diukur, namun, menunjukkan beberapa karakteristik yang meliputi arah, intensitas, keluasan, konsistensi, dan spontanitas. Arah, berarti sikap akan menunjukkan setuju atau tidak setuju terhadap suatu obyek. Intensitas atau kekuatan sikap, yaitu derajat atau tingkat kebersetujuan atau ketidakbersetujuan terhadap suatu obyek. Keluasan sikap menunjukkan kepada luas atau tidaknya cakupan aspek dari obyek yang disetujui atau tidak disetujui.

Konsistensi sikap ditunjukkan oleh kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan oleh subyek dengan responnya terhadap obyek, yaitu tidak adanya kebimbangan dalam bersikap. Spontanitas yaitu sejauh mana kesiapan subyek untuk menyatakan sikapnya secara spontan tanpa perlu mengadakan pengungkapan atau desakan terhadap subyek dalam menyertakan sikapnya. Sikap manusia dibentuk oleh responnya terhadap sosialnya, yang membentuk pola sikap tertentu. Faktor-faktor pembentuk sikap antara lain pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu.

⁹³ Ajzen. 1991: 179-200

⁹⁴ Saifuddin Anwar, 1988: 9-10

Jadi sikap kritis mahasiswa lebih dibentuk oleh pendidikan dan idealisme sebagai golongan usia dewasa muda.

Kehidupan politik di Indonesia ditandai dengan gejala resistensi masyarakat terhadap negara serta bermacam-macam bentuk ketidakpuasan lainnya. Berdasarkan teori *relative deprivation* dari Ted Robert Gurr (1970)⁹⁵, hal ini disebabkan adanya perampasan (*deprivation*) bahwa jika orang merasa sesuatu yang dihargainya, bermanfaat baginya, dirampas; artinya ada kesenjangan antara nilai yang diharapkan dan kapabilitas untuk meraih nilai yang diperlukan. *Relative deprivation* bisa menyulut ketidakpuasan dalam masyarakat yang berwujud kejengkelan, kemarahan, kemurkaan; tergantung pada kedalaman rasa terampas. Kadar ketidakpuasan akan berkurang bila tersedia sarana untuk menyalurkannya, jika tidak, akan bermetamorfosis menjadi pemberontakan dengan kekerasan yang berwujud kekacauan, konspirasi, atau perang dalam negeri.

Sasaran kekerasan akan lebih terarah ketika menyadari siapa dan apa yang menyebabkan rasa tidak puas, misalnya kekerasan bisa tertuju pada simbol-simbol lembaga negara seperti bangunan pemerintah, pengadilan, kantor polisi atau militer yang dianggap sumber perampasan hak mereka. Penumpasan terhadap protes ini justru akan menambah intensitas ketidakpuasan yang pada akhirnya menyulut eskalasi atau lebih jauh meletupkan kerusuhan dan memicu gerakan revolusi.

Menurut Munafrizal Manan⁹⁶, hal ini nampak dalam pergerakan mahasiswa pada peristiwa reformasi. Semula, pergerakan mahasiswa merupakan bentuk aksi keprihatinan terhadap krisis ekonomi yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Aksi itu mula-mula hanya diikuti oleh segelintir mahasiswa dan lebih sering dilakukan dalam kampus. Namun, efek bola salju gerakan itu terus meluas dan berkembang menjadi pergerakan mahasiswa se-Indonesia dengan isu pokok suksesi kepemimpinan nasional dan reformasi total. Aksi-aksi mahasiswa mendapatkan liputan luas dan simpatik oleh pers, dan menjadi magnet banggunya solidaritas mahasiswa (dan masyarakat) secara luas.

⁹⁵ Dalam Munafrizal Manan, 2005: 24-25

⁹⁶ Munafrizal Manan, 2005: 77

Menurut M. Umar⁹⁷ mahasiswa sebagai kaum muda mempunyai potensi menjadi pemimpin yang mampu mentransformasikan nasionalisme ke dan nilai-nilai kebangsaan ke dalam bentuk aksi yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Ditambahkan pula bahwa pemimpin harus mempunyai kemampuan: *pertama*, merumuskan inovasi dan kecepatan untuk merespon perkembangan zaman; *kedua*, mengenali, mengidentifikasi, dan mengelola sumber daya baik yang bersifat *tangible* dan *intangible* yang dimilikinya; *ketiga*, mengenali dan mengidentifikasi perubahan lingkungan internal dan eksternal; *keempat*, memprediksi dan menyikapi perubahan dengan bijaksana. Keempat faktor tersebut terdapat dalam diri mahasiswa yang juga adalah kaum muda sehingga menjadi faktor strategis dalam mempertahankan ketahanan nasional. Artinya perubahan sosial yang senantiasa diciptakan oleh mahasiswa tidak berpaling dari norma-norma yang telah dibangun oleh *founding fathers* bangsa.

Dari beberapa teori pergerakan mahasiswa di atas, maka dirumuskan definisi konseptual pergerakan mahasiswa sebagai variabel bebas (Y) dalam penelitian ini adalah aksi mahasiswa yang merupakan reaksi terhadap nasionalisme sempit dan perubahan sosial menyimpang yang menyebabkan kemarahan masyarakat.

2.4 Ketahanan Nasional

Istilah ketahanan nasional merupakan gagasan Bung Karno yang diucapkan tahun 1958 di Kotaraja (kini Banda Aceh) setelah menerima *defile*. *Alangkah besar hati kita menerima jikalau satu bangsa ingin menjadi besar dan kuat, bangsa itu harus memenuhi tiga syarat, harus mempunyai tiga ketahanan: nomor satu ketahanan militer, nomor dua ketahanan ekonomi, nomor tiga ketahanan jiwa*. Mengkaji ketahanan nasional harus dilihat dari dua sisi, yaitu kondisi sebagai masukan/modal dan konsepsi sebagai keluaran sekaligus kondisi untuk konsepsi yang akan datang.

Menurut Haryomataram⁹⁸, konsepsi ketahanan nasional Indonesia telah disusun secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan walaupun masih perlu penyempurnaan. Ketahanan nasional menurut rumusan Lembaga Ketahanan

⁹⁷ M.Umar, 2008: 281

⁹⁸ Haryomataram, 1980: 111

Nasional⁹⁹ juga dikutip oleh Sunardi¹⁰⁰; ialah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi ketangguhan dan keuletan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri dan untuk menjamin identitas integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sedangkan menurut Soemarno¹⁰¹, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan eksistensinya dalam melangsungkan hidupnya sesuai dengan cita-cita dan citranya sendiri.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan adalah kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari dalam maupun luar negeri.

Azas ketahanan nasional Indonesia ialah: *Pertama*, tata laku atau sistem kehidupan nasional yang merupakan implementasi tujuan nasional yang harus dicapai bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumbuh darah Indonesia (keamanan), memajukan kesejahteraan (kesejahteraan), mencerdaskan kehidupan bangsa (kesejahteraan), turut menjaga ketertiban dunia (keamanan). *Kedua*, komprehensif integral mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yaitu geografi, sumber kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. *Ketiga*, wawas ke dalam dan wawas ke luar, ke dalam bertujuan menumbuhkan nasionalisme terbuka, ke

⁹⁹ Lemhannas, 2001:106-109

¹⁰⁰ RM Sunardi, 2005: 6

¹⁰¹ Soemarno Sudarsono, 1997:23

luar bertujuan membentuk daya tangkal dan daya tawar. *Keempat*, kekeluargaan; mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan sifat ketahanan nasional ialah: *Pertama*, mandiri atau *independency*; sebagai prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (*interdependent*). *Kedua*, dimanis; sesuai perkembangan lingkungan strategis yang berorientasi pada masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. *Ketiga*, wibawa; yang dilandasi kemampuan yang mampu meningkatkan daya tangkal bangsa dan negara; konsultasi dan kerja sama dengan saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

Menurut Wan Usman¹⁰², secara konseptual ketahanan nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya; kekuatan apa yang harus dimiliki suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar; dan ketahanan adalah kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (*reguler*) dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (*the stability idea of changes*).

Dalam pengertian itu, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi itu harus dibina terus menerus secara sinergi mulai dari pribadi, keluarga, wilayah, dan negara. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi ketahanan nasional dilaksanakan dengan pemikiran geostrategi, yaitu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Ketahanan nasional dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional, yang menurut Lemhannas (1999)¹⁰³ meliputi sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem hukum, dan sistem pertahanan keamanan.

¹⁰² Wan Usman, 2003: 4-5

¹⁰³ Lemhannas, 1999.

Sistem politik yang dapat menyerap aspirasi rakyat melalui komunikasi politik antar suprastruktur, infrastruktur dan substruktur politik, memberdayakan peran rakyat melalui pelibatan di lembaga legislatif maupun infrastruktur politik, memberi peran daerah dalam otonomi daerah, menempatkan TNI dan Polri sebagai alat negara. Semua ini dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional, keteladanan dari pimpinan nasional, pengamalan Pancasila, dan kedaulatan rakyat yang didukung oleh sistem hukum nasional.

Sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat dan *resources based*, berorientasi pada masa depan, mandiri, berdaya saing tinggi, mampu mengembangkan potensi ekonomi nasional dan tersebar pusat pertumbuhan ekonomi. Menggalang keterpaduan segenap komponen bangsa dengan kemampuan masing-masing untuk mengatasi krisis ekonomi nasional terutama pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemanfaatan sumber kekayaan alam, yaitu agrobisnis, kelautan, dan pariwisata (bukan impor) secara rasional dan pemerataan hasil-hasilnya, menata kembali struktur ekonomi antara manufaktur dan pertanian, menyetatkan sistem perbankan.

Sistem sosial budaya yang menciptakan manusia dan masyarakat yang beriman, bertakwa, nasionalis, beradab, bebas dari rasa takut, demokratis, disiplin, produktif, inovatif, harmonis SARA damai, saling memahami, dan mendukung keberadaan masing-masing. Dengan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan *nation and character building* yang sesuai dengan nilai luhur agama, budi pekerti, iptek, mewujudkan budaya nasional dengan atribut-atributnya dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa persatuan, membuka transportasi dan komunikasi ke seluruh wilayah Indonesia dan ke luar negeri dalam rangka ikut berperan dalam globalisasi dengan segala dampaknya, membuka akses pers yang bebas dan bertanggung jawab, menghilangkan arogansi pimpinan dan meningkatkan kearifan dan sikap bijak pimpinan nasional.

Sistem hukum yang dijabarkan secara utuh, terpadu, menyeluruh yang mampu mengatur, membela, dan mengayomi rakyat, meningkatkan harkat dan martabat rakyat, memantapkan kesadaran hak dan kewajiban rakyat, dan terwujudnya produk hukum tertulis dan tidak tertulis; dengan komitmen menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD

1945 sebagai sumber hukum, sistem hukum nasional harus mampu mewartakan norma lembaga adat dan mencegah gejolak sosial, penjabaran sistem hukum harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan zaman.

Sistem pertahanan keamanan, yang dapat menciptakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) tangguh dan selalu siap dikerahkan dan digunakan untuk menanggulangi ancaman, didukung oleh kesadaran bela negara rakyat, bangga dan sadar berbangsa dan bernegara, TNI dan Polri yang memiliki profesionalisme, kompak, tanggap, mobilitas tinggi, teguh dan idealis, akrab dengan kemajuan iptek dan masyarakat, menunggal dengan rakyat. Dengan mengintensifkan pengelolaan hankam, meluruskan kembali peran sosial politiknya dalam mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, dan melaksanakan bakti kepada rakyat.

Teori ketahanan nasional dalam penelitian ini digunakan alat ukur untuk menentukan indikator dan butir instrumen penelitian dan perpektif analisis terhadap pergerakan mahasiswa. Untuk menentukan instrumen penelitian teori ketahanan nasional dihubungkan dengan perubahan sosial yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional (lihat Fuad Hassan, 1977). Instrumen penelitian tersebut dijabarkan dalam dimensi dan subindikator sebagai berikut: *pertama* politik: demokrasi dan lembaga/aparatur negara; *kedua*, ekonomi: ekonomi kerakyatan dan liberalisasi ekonomi; *ketiga*, sosial budaya: jatidiri bangsa dan hubungan sosial; *keempat*, hukum: sistem hukum dan kesadaran hukum; *kelima*, pertahanan keamanan: pertahanan dan keamanan. Sedangkan teori ketahanan nasional sebagai alat analisis perspektif peran pergerakan mahasiswa dijabarkan dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.